

RPSEP-07

**IRONI PROGRAM HIBAH RUANG KELAS BARU (RKB)
DI PROVINSI JAWA BARAT**
**Sebuah studi kasus: Program Hibah RKB Gubernur Jawa Barat
tahun anggaran 2013-2014 oleh Organisasi X**

Bunga Aprillia, S. AP., M.Si.

Program Studi Ilmu Politik Universitas Wanita Internasional
Jl. Ahmad Yani no. 18-20 Bandung
Email : bunga.april@gmail.com

Abstrak

Program hibah pembangunan ruang kelas baru (RKB) merupakan salah satu solusi yang diberikan Gubernur Jawa barat dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Program tersebut memiliki peran yang besar dalam membangun sekolah yang masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana khususnya di wilayah Jawa Barat. Menurut beberapa berita yang dilansir oleh media cetak dan elektronik program hibah RKB digunakan sebagai alat untuk mendapatkan beberapa keuntungan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Hasil sementara dari lapangan, menunjukkan bahwa program hibah RKB telah digunakan dengan cara yang tidak bertanggung jawab oleh beberapa oknum khususnya di wilayah Jawa Barat⁹.

Paradigma *New Public Service* menjadi kerangka yang digunakan untuk melihat bahwa implementasi kebijakan program hibah RKB seharusnya menjadi pelayanan yang bersifat mengutamakan kepentingan publik. Teori implementasi kebijakan yang diusung oleh Adam smith akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan program hibah RKB yang lebih bersifat *bottom up* ini dipengaruhi oleh kebijakan yang ideal, target grup, badan pelaksana dan faktor lingkungan. Pada akhirnya, penelitian ini akan menunjukkan kekuatan dan kelemahan dalam penggunaan implementasi kebijakan *bottom up*.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pendekatan *bottom up*, program hibah, *new public service*.

A. Latar Belakang

Tahap implementasi merupakan tahapan selanjutnya dari proses kebijakan. Tahap ini melibatkan banyak aktor untuk terlibat dalam setiap pelaksanaan prosedur juga teknik yang dilakukan dilapangan. Pendekatan implementasi kebijakan terbagi kedalam dua arah yaitu *top down* (dari atas ke bawah) dan *bottom up* (dari bawah ke

⁹ Keterangan diringkas dari berita yang dilansir oleh beberapa media elektronik

atas). Pendekatan pelaksanaan kebijakan publik yang bersifat *top down* merupakan pelaksanaan yang dimulai dari aktor pemerintah untuk diteruskan kepada publik (warga negara). Berbeda dengan implementasi kebijakan yang bersifat *bottom up* pelaksanaannya yang dimulai dari publik (warga negara) untuk diteruskan kepada aktor pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan paradigma baru *New Public Service* seyogyanya masih bisa diselaraskan bukan hanya dengan implementasi kebijakan yang bersifat *bottom up* tetapi juga bisa diselaraskan dengan implementasi kebijakan yang bersifat *top down*. Perspektif *New Public Service* menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Selaras dengan perspektif *New Public Service*, pelaksanaan kebijakan yang bersifat *bottom up* juga mengutamakan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini menjadi sangat penting.

Pelaksanaan kebijakan program RKB merupakan implementasi kebijakan yang bersifat *bottom up*, dimana Pergub No. 56 Tahun 2013 merupakan peraturan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaannya. Seyogyanya kebijakan yang bersifat *top down* tetap dijalankan dengan pendekatan *bottom up* dalam rangka mengedepankan masyarakat sebagai kepentingan utama untuk dilayani. Program pembangunan ruang kelas baru dilaksanakan secara swakelola melalui mekanisme partisipasi masyarakat dengan subsidi langsung ke sekolah, maka pelaksanaan program ini disebut sebagai pelaksanaan yang menggunakan pendekatan *bottom up*. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sekolah bersama masyarakat dan tidak boleh dikontrakan kepada pihak ketiga. Dengan demikian diharapkan sekolah dan masyarakat akan mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi dan bertanggungjawab untuk senantiasa memelihara fasilitas yang ada tersebut agar bisa mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya untuk kegiatan pembelajaran.

Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat tercapai apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan mutu pendidikan dalam bidang akses pendidikan, masih banyak sekolah-sekolah yang saat ini dilaporkan dalam kondisi rusak dan kurang memenuhi syarat. Pada tahun 2013, dilaporkan bahwa dari 271.745 ruang kelas pada 28.835 sekolah negeri dan swasta yang terdapat di Jawa Barat, tercatat kurang lebih 11,78% dalam

keadaan rusak ringan sampai berat¹⁰. Kondisi ruang kelas tersebut kurang lebih memberikan gambaran umum kondisi fisik sarana dan prasarana sekolah yang bersangkutan. Sadar akan hal tersebut, pemerintah provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan melalui program subsidi pembangunan ruang kelas baru (RKB) Sarana dan Prasarana sekolah melalui pembangunan ruang kelas baru yang mengalami kerusakan.

Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk yang mengucurkan dana hibah dan bansos dalam jumlah yang besar. Berdasarkan data KPK, pada 2010 dana hibah Pemprov Jabar hanya 1,43% dari total APBD sedangkan dana bansos mencapai 1,73. Pada 2011 terdapat kenaikan hibah menjadi 2,72% dan 3,40%. Tahun 2012 dana hibah melonjak tajam menjadi 30,7%, meskipun dana bansosnya hanya 0,08%. Tahun 2013 dana hibahnya Jabar masih di angka 30,53% dan bansos sebesar 0,15%. Pengucuran hibah Jawa Barat berada di atas rata-rata anggaran dana hibah dari APBD secara nasional. Secara nasional rata-rata pengucuran dana hibah 2012 hanya 20,68% dan 23,11% pada 2013. Angka-angka tersebut menempatkan Jabar sebagai daerah dengan hibah tertinggi pada 2012 dan 2013. Pada 2012, Jabar mengucurkan dana hibah sebesar Rp 4,8 triliun¹¹. Perhitungan angka tersebut menjadi rujukan penulis untuk melihat kembali contoh kasus pertanggungjawaban program hibah ruang kelas baru tahun anggaran 2013/2014 di Jawa Barat.

Salah satu contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah seminar bimbingan teknis program RKB bantuan hibah dari Gubernur Jabar tahun anggaran 2013/2014 diselenggarakan di salah satu Hotel bintang dua di Bandung pada tanggal 27-28 Februari 2014 oleh organisasi X dengan tujuan tindak penipuan terhadap target grup. Melalui seminar bimbingan teknis, penulis yang juga sebagai pemateri untuk seminar tersebut merasakan hal yang janggal dimana tidak adanya transparansi bahwa bimbingan teknis ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah Jawa Barat. Terlebih ketika seminar ini diselenggarakan oleh Event Organizer (EO) bukan oleh organisasi non profit seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak dari EO bahwa peserta seminar yang diantaranya kepala sekolah dari berbagai sekolah di Jawa Barat adalah peserta yang telah terpilih untuk mendapatkan hibah dari pemerintah sehingga seminar bimbingan teknis hanya sebagai formalitas saja,

¹⁰ Buku panduan pelaksanaan Program Subsidi Pembangunan Ruang Kelas Baru Bantuan hibah Gubernur Prov. Jabar berdasarkan jenjang/tingkatan sekolah di Prov. Jabar. Tahun anggaran 2013/2014, hal. 1.

¹¹ <http://www.pikiran-rakyat.com/node/267578>, diakses pada tanggal 10/9/14

selain itu diketahui pula bahwa sebelum didaftarkan menjadi peserta panitia menarik dana dari masing-masing peserta sejumlah 25% dari jumlah uang yang akan diterima¹². Dari beberapa indikasi masalah tersebut bahasan ini akan terfokus pada bagaimana pelaksanaan program subsidi pembangunan ruang kelas baru (RKB) tahun anggaran 2013/2014 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sehingga mengakibatkan banyaknya oknum tindak penipuan dan kerugian peserta hibah.

B. Telaah Literatur

Implementasi kebijakan dengan pendekatan *bottom up*

Penelitian ini akan melihat implementasi kebijakan dengan pendekatan *bottom up* yang diusung oleh Adam Smith karena pelaksanaan kebijakan yang dilakukan merupakan pelaksanaan yang bersifat swakelola antara sumbangan yang diberikan pemerintah dan juga sumbangan dari masyarakat. Menurut Parsons (2006), model pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu ¹³:1. *Idealized policy* yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya 2. *Target groups* yaitu bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan 3. *Implementing organization* yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. 4. *Environmental factors* unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik

¹² Wawancara dengan pemilik event organizer sebagai penyelenggara bimtek program RKB pada tanggal 26 Februari 2014

¹³Diakses pada tanggal 6 / 10/14, <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-shandydwip-24320-2-babii.pdf>

Keempat variabel tersebut tak berdiri sendiri akan tetapi saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian yang pada akhirnya menimbulkan *tension* (tekanan) bagi terjadinya tawar menawar antara *formulator* dan *implementator*. Model ini memandang bahwa implementasi kebijakan tak berjalan secara *linear* dan mekanistik tetapi memberi peluang terjadinya bargaining untuk menghasilkan kompromi terhadap implementasi yang berdimensi *target group*.

C. Metode Penelitian

Penelitian studi kasus adalah salah satu bentuk dari penelitian kualitatif yang fokus pada penyediaan perhitungan yang detail dari satu atau banyak kasus. Penelitian studi kasus digunakan untuk menggambarkan sebuah entitas dalam bentuk unit tunggal seperti perorangan, sebuah organisasi atau institusi.¹⁴ Tujuan dari studi kasus dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagian dari suatu kasus secara detail. Dalam menyelidiki fenomena tersebut maka penulis mengambil responden diantaranya adalah petugas pengelola program hibah RKB dari Pemprov Jabar bagian pendidikan dan pelayanan sosial, event Organizer sebagai penyelenggara seminar bimtek, Peserta program hibah RKB, petugas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar.

D. Pembahasan

Sosialisasi dan Bimbingan teknis sebagai pola interaksi

Kebijakan program hibah RKB memberikan angin segar untuk sekolah yang membutuhkan bantuan sarana prasarana sekolah, terutama sekolah yang berada di desa dan pedalaman. Sosialisasi dan bimbingan teknis merupakan langkah pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pedoman pelaksanaan dan petunjuk secara teknis mengenai program hibah. Langkah ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membentuk pola interaksi antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan sekolah yang menerima bantuan sebagai target grup. Sosialisasi dan bimbingan teknis perlu dilakukan mengingat pelaksanaan kebijakan ini tergantung dari kesiapan para peserta (sekolah). Kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan untuk mau dilibatkan dalam swakelola pembangunan RKB.

¹⁴ Merriam, Sharan B, 2002, *Qualitative Research in Practice (Part1: The nature of Qualitative Inquiry)*, John Wiley and Sons Ltd.

Pelaksanaan kebijakan melalui sosialisasi ini dinilai positif karena sosialisasi dan bimbingan teknis secara langsung menjadi wadah bertemunya pemerintah dan peserta untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi sekolah yang ingin diberikan hibah dan bagaimana cara mengajukan proposal yang baik. Disamping itu, bimbingan teknis diselenggarakan agar terjadi perjanjian kerjasama hibah RKB antara pemerintah dan peserta.

Sekolah yang membutuhkan bantuan sebagai target grup

Sekolah yang membutuhkan bantuan ruang kelas baru merupakan target grup dari kebijakan program hibah RKB. Target grup ini diharapkan dapat memahami materi yang disampaikan pada saat bimbingan teknis dan sosialisasi. Sekolah yang membutuhkan bantuan harus memenuhi berbagai persyaratan untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah. Menurut Kepala Biro Humas Pemprov Jabar, Rudi Ganda Kusumah menjelaskan, pada prinsipnya penerima hibah dan bansos di Pemprov Jabar harus memenuhi lima prasyarat wajib. Pertama penerima merupakan warga asli Jabar punya KTP Jabar; kedua, ada rekening yayasan atau organisasi bukan rekening pribadi; ketiga, mengajukan proposal pengajuan kegiatan, menandatangani fakta integritas; kelima, serta dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya sesuai dana peruntukan yang diberikan¹⁵.

Kurangnya pemahaman masyarakat terutama sekolah terhadap kebijakan program hibah RKB ini menjadi salah satu kemungkinan berkembangnya kasus penipuan program hibah RKB terhadap sekolah¹⁶. Sekolah yang membutuhkan bantuan belum mengerti bagaimana membuat proposal dengan baik, siapa seharusnya aktor yang terlibat, pemahaman mereka mengenai bantuan hibah pun sangat kurang. Kurangnya pemahaman dari sekolah-sekolah dimanfaatkan oleh lingkungan sosial yaitu masyarakat/ kelompok/ individu untuk melakukan kecurangan.

Data lapangan menunjukkan bahwa terdapat sosialisasi dan bimbingan teknis program dana hibah ruang kelas baru tahun anggaran 2013/2014 yang merupakan sebuah tindak penipuan. Hal ini merupakan pembuktian secara jelas bahwa kurangnya pemahaman target grup akan dimanfaatkan oleh sebagian kelompok/individu untuk berbuat curang dan merugikan.

¹⁵ <http://nusantara.rmol.co/read/2014/01/29/141802/Pemprov-Jabar-Didesak-Umumkan-Nama-nama-Penerima-Hibah-dan-Bansos->, merupakan situs berita politik yang diakses pada tanggal 22/9/2014

¹⁶ Hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Pendidikan rovinsi Jabar pada tanggal 25 September 2014

Bimbingan teknis yang dimaksud diatas meliputi penyampaian materi petunjuk pelaksanaan RKB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, keuangan hingga petunjuk pelaksanaan pertanggungjawaban. Acara bimbingan teknis diselenggarakan oleh oknum yang mengalihkan kepada *event organizer* yang telah dipilih sebelumnya. Bimbingan teknis berlangsung selama 2 hari di salah satu hotel bintang dua di Jalan Pangarang Bandung, peserta yang hadir terdiri dari 80 sekolah yang diwakili oleh Kepala Sekolah maupun Kepala Desa¹⁷. Materi yang dipaparkan oleh para pembicara merupakan materi yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara. Buku panduan petunjuk pelaksanaan program hibah RKB dijadikan pegangan para pembicara untuk penyampaian materi. Dalam acara tersebut ditemukan keluhan para Kepala Sekolah mengenai sekolah dan desa nya masing-masing. Salah satu hal yang menjadi keluhan adalah dana yang masih belum tentu adanya. Keluhan lainpun diungkapkan bahwa keterangan tentang pemberian dana bantuan terhadap sekolah masih belum mendapat jawaban. Setelah seminar selesai, tiga orang Kepala Sekolah secara pribadi mengutarakan bahwa program ini sangat diharapkan karena selama ini mereka tidak memiliki tempat atau ruang kelas yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Biasanya kegiatan belajar mengajar dilakukan di masjid, ruang terbuka atau sekolah Madrasah Islamiyah lain yang tidak dipakai pada waktu-waktu tertentu. Beberapa kisah yang diutarakan bapak-bapak ini membuat penulis merasa yakin bahwa memang program bantuan hibah gubernur ini dibutuhkan dan memiliki tingkat urgensi yang luar biasa dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.

Dalam kurun waktu enam bulan berikutnya, ramai diberitakan bahwa marak terjadi penipuan program dana bantuan sosial salah satunya adalah dana hibah RKB. Beberapa media elektronik dan cetak memberitakan terdapat 315 sekolah swasta di Jawa Barat diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh AP dan CS, yang mengaku menjadi koordinator pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jabar.

Permasalahan selanjutnya, ditemukannya pungutan dana dari peserta yang mengikuti bimtek dan sangat disayangkan bahwa memang benar mereka diminta sekitar lima juta perorang/persekolah untuk mencairkan dana hibah RKB tersebut, bahkan pengelola tidak memberi kabar dan dana hibah pun tidak cair hingga hari ini¹⁸. Kejadian tersebut sama halnya dengan yang telah diungkapkan media bahwa untuk mendapatkan bantuan hibah RKB setiap sekolah harus memberi uang muka terhadap pelaku yang

¹⁷ Data terlampir

¹⁸ Wawancara dengan salah satu peserta bimtek melalui telepon pada tanggal 9/9/14 13.47

mengaku sebagai konsultan pemprov dan pimpinan proyek dana bantuan tersebut. Jumlah uang yang diminta berkisar dari Rp 14 juta hingga Rp 22 juta¹⁹. Berita tersebut merupakan beberapa bukti bahwa program dana hibah RKB yang dimanfaatkan oleh kepentingan individu bukan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah khususnya untuk peningkatan mutu pendidikan tetapi justru merugikan masyarakat terlebih lagi ditemukan banyaknya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

Dinas Pendidikan dan Sekolah sebagai Badan Pelaksana

Badan pelaksana merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan kebijakan, begitu pula dengan pelaksanaan kebijakan program hibah yang bersifat *bottom up*. Tentunya badan pelaksana dalam implementasi kebijakan dengan pendekatan *bottom up* bukan hanya pemerintah, tetapi juga *stake holder* yang lain. Implementasi kebijakan program hibah melibatkan pemerintah dan sekolah yang membutuhkan sebagai aktor. Pemerintah di tingkat daerah yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sebagai langkah awal implementasi, program hibah RKB dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi yang langsung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung sesuai dengan tingkatan sekolah. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah menengah atas memiliki dikelola oleh masing-masing divisi tersendiri.

Berdasarkan banyaknya kasus penipuan yang dilakukan oleh beberapa oknum, penelitian ini mencoba memberikan informasi resmi dari pemerintah bahwa setiap bimbingan teknis atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah²⁰; 1) diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis, tidak dikontrakan kepada pihak ketiga, 3) kegiatan dilakukan sesuai dengan tahun anggaran yang bersangkutan 4) tidak pernah menyelenggarakan bimbingan teknis dengan tingkatan sekolah yang beragam (campur), 5) setelah dilakukan bimbingan teknis, pemerintah akan melakukan verifikasi langsung ke sekolah yang bersangkutan. Hal ini memberikan pemahaman informasi yang jelas bahwa pemerintah memiliki prosedur yang jelas mengenai setiap kegiatan RKB yang dilakukan. Jika kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tidak sesuai dengan ketentuan diatas maka bimbingan teknis tersebut tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah akan sulit untuk bertanggungjawab akan beberapa tindak

¹⁹ <http://www.pikiran-rakyat.com/node/281968>, diakses pada tanggal 9/9/2014.

²⁰ Hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Pendidikan rovinsi Jabar pada tanggal 11 September 2014

penipuan yang akhir-akhir ini terjadi dan biasanya langsung ditangani oleh pihak kepolisian untuk kelanjutannya.

Sekolah merupakan badan pelaksana sekaligus sebagai target grup karena kebijakan yang menggunakan pendekatan *bottom up* akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan kebijakannya. Sekolah sebagai badan pelaksana pada tahap pembangunan ruang kelas baru. Tahap pembangunan ruang kelas baru adalah tahap dimana sekolah memiliki peran utama dalam melaksanakan kebijakan ini. Pada tahap ini, pemerintah sangat mengandalkan swakelola sekolah dan masyarakat sekitar dalam membangun ruangan. Sekolah yang bersangkutan akan dimintai persetujuan untuk membangun ruang kelas baru dengan cara swakelola, biasanya perjanjian ini dilakukan pada saat bimbingan teknis. Setelah perjanjian dilakukan, sekolah harus memberikan proposal agar pemerintah bisa memperkirakan berapa dana hibah yang bisa dikeluarkan sesuai dengan pagu yang diajukan di dalam proposal. Sesuai dengan ketentuan tersebut, jumlah dana program hibah tidak bisa ditentukan di awal pada saat akan melakukan bimbingan teknis. Cara ini dimaksudkan agar tidak terjadi permintaan uang muka kepada sekolah yang membutuhkan bantuan.

Hasil penelitian pada kasus yang sama, para oknum kembali mengundang *event organizer* yang sama untuk mengumpulkan 15 sekolah lagi yang akan diikutsertakan dalam bimtek program dana hibah lanjutan²¹. Setelah terkumpul 15 sekolah di suatu rumah makan di daerah Cinunuk, Kabupaten Bandung, calon peserta bimtek dimintai uang muka 25% dari dana hibah sebesar Rp. 125.000.000 untuk kelancaran cairnya dana tersebut. Kepala sekolah dari 15 sekolah sudah setuju dengan persyaratan tersebut, tetapi *event organizer* yang ditunjuk oleh oknum menggagalkan hal tersebut dan menyatakan ketidakmampuannya untuk menjadi penyelenggara acara bimtek selanjutnya karena mencium aroma penyalagunaan kewenangan di dalamnya.

Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa terdapat banyaknya tindak penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab. Tindak penipuan ini dilakukan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada pula yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar. Berdasarkan informasi dari Kasubag pendidikan dan pelayanan sosial Pemerintah Provinsi Jabar bahwa maraknya penipuan ini membuat Sekretaris Daerah mengambil langkah untuk investigasi terhadap kemungkinan kejadian di lapangan, hasilnya ditemukan lebih dari dua tindak penipuan yang telah diinvestigasi telah merugikan banyak pihak.

²¹ Wawancara dengan pemilik Event Organizer Maret 2014

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan

Faktor lingkungan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap setiap pelaksanaan kebijakan. Dampak negatif dari faktor lingkungan bagi pelaksanaan program RKB tersebut adalah terdapat oknum di lingkungan masyarakat yang melihat kebijakan ini mudah disusupi oleh tindak penipuan. Pertanyaan selanjutnya mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana badan pelaksana menanggapinya. Apabila dikaji kembali tindak penipuan program RKB dilakukan oleh kelompok/individu yang memiliki niat buruk. Pada kenyataannya implementasi kebijakan ini sangat mudah disusupi oleh berbagai kepentingan individu yang ingin meraup keuntungan besar dalam sekejap. Hasil penelitian lapangan ditemukan indikasi bahwa banyaknya tindak penipuan dikarenakan pelaksanaan program hibah RKB bukan dilakukan oleh satu badan saja tetapi juga ada pihak lain yang melaksanakan kebijakan ini. Salah satu responden dari Dinas Pendidikan Provinsi Jabar saat itu menyebutkan bahwa kebijakan ini dilaksanakan pula oleh Pemerintah Provinsi Jabar sebagai “aspirasi anggota dewan” atau dengan kata lain disebut juga kegiatan non DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Dana yang digunakan untuk pelaksanaan hibah RKB dikeluarkan dari APBD dan ketika sudah dapat dilaksanakan masuk kedalam dana DPA, tetapi ada beberapa kepentingan anggota dewan yang harus dikabulkan sehingga menggunakan program hibah langsung kepada target grup tidak melalui penyelenggaraan bimbingan teknis/ sosialisasi. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa ada lebih dari satu pelaksana kebijakan program hibah sehingga memberikan peluang kepada individu tertentu untuk menyalahgunakan kebijakan program hibah RKB. Lingkungan politik memberikan sumbangsih dari ketidakberhasilan pelaksanaan program hibah RKB ini dan lingkungan sosial merespon dengan memanfaatkan kondisi tersebut.

Lingkungan sosial yang merupakan masyarakat pemantau pelaksana justru memanfaatkan peluang keterlibatan aktor lain dalam pelaksanaan kebijakan program RKB dengan melakukan tindak penipuan, sejauh orang tersebut mengetahui adanya program RKB. Kasus ini merugikan para peserta bimtek karena uang yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak ada kejelasan. Tentunya kasus tersebut menjadi masalah publik dimana adanya keterlibatan dari pihak yang dirugikan karena sangat membutuhkan program tersebut.

Lingkungan politik yang didefinisikan sebagai kepentingan anggota dewan tertentu sudah mengacaukan esensi dari implementasi *new public service* dimana setiap

implementasi kebijakan harus mengedepankan kepentingan publik. Kepentingan publik sudah jelas terpinggirkan demi kepentingan pribadi atau kelompok orang tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam buku “*bringing the public back in*” khususnya dilihat dari *perspective* warga negara bahwa pelayanan publik melalui program pemerintah harus memuliakan publik dimana didalamnya terdapat perhatian bersama bagi kebaikan bersama²².

E. Kesimpulan dan Saran

Pada dasarnya implementasi kebijakan dengan pendekatan *bottom up* memiliki kekuatan yang akan memberikan keleluasaan pada sekolah-sekolah untuk terlibat dan secara langsung mengedepankan kepentingan publik. Disisi lain implementasi menggunakan pendekatan *bottom up* memiliki kelemahan seperti yang tercermin pada munculnya kemungkinan aktor lain yang terlibat dan dengan sengaja menyalahgunakan program hibah ini baik dari sisi lingkungan politik ataupun sosial.

Daftar Pustaka

Buku

- Buku panduan pelaksanaan Program Subsidi Pembangunan Ruang Kelas Baru Bantuan hibah Gubernur Prov. Jabar berdasarkan jenjang/tingkatan sekolah di Prov. Jabar. Tahun anggaran 2013/2014.
- Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt, 2007, *New Public Service*, M.E., Sharpe Inc., Armonk, New York.
- Fariad, Ali, 1997, Metodologi Penelitian Sosial Dalam bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartasasmita, PS., 2006, “*Binging the public back in*”: Revitalisasi Konsep Publik dalam pemikiran dan praktek Administrasi Publik di Indonesia, Graha Ilmu : Yogyakarta..
- Robert.K., Yin, 2002, Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sharan B, Merriam, 2002, *Qualitative Research in Practice (Part1: The nature of Qualitative Inquiry)*, John Wiley and Sons Ltd.
- Silalahi, Ulber, 2010, Metode Penelitian Sosial, Bandung : Refika Aditama, cetakan kedua April.
- Smith, Adam and Islamy, *Public Policy Implementation*,
- Suparmoko, M., Keuangan Negara dalam teori dan praktek, Edisi 5, BPFE – Yogyakarta : 2003.

Internet

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-shandydwip-24320-2-babii.pdf>

²² Kartasasmita, PS., 2006, “*Binging the public back in*”: Revitalisasi Konsep Publik dalam pemikiran dan praktek Administrasi Publik di Indonesia, Graha Ilmu : Yogyakarta.

<http://www.fokusjabar.com/2014/01/27/ini-himbauan-kpk-untuk-kepala-daerah/>,
<http://www.nasional.kompas.com/read/2013/02/20/02070085/Hentikan.Dana.Ba nsos>
<http://www.nusantara.rmol.co/read/2014/01/29/141802/Pemprov-Jabar-Didesak-Umumkan-Nama-nama-Penerima-Hibah-dan-Bansos->
<http://www.pikiran-rakyat.com/node/281968>
<http://www.pikiran-rakyat.com/node/267578>